PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. RW. Monginsidi No. 69 Telukbetung – Bandar Lampung
Telp./Fax (0721) 475270 E-mail : kominfo@lampung.go.id

PRESS RELEASE

Gubernur Arinal Djunaidi Hadiri Sosialisasi Perpres 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli, Pemprov Lampung Lakukan Langkah Menciptakan Pelayanan Berkualitas, Cepat, Mudah, Terjangkau, dan Terukur.

BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya memerlukan komitmen dari semua pihak. Upaya-upaya yang dilakukan itu, terkadang ada permasalahan yang timbul, salah satu diantaranya adalah adanya praktek-praktek pungutan liar.

Oleh karena itu menurut Gubernur, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Lampung.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi antar Unit Pemberantasan Pungli Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kinerja satgas sehingga optimalisasi pemberantasan pungli dapat tercapai demi tercipta pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar serta bebas dari Perilaku Koruptif," ucap Gubernur saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli Di Provinsi Lampung Tahun 2022, di Hotel Novotel, Rabu (07/09/2022).

Gubernur Arinal menyampaikan bahwa, dalam konteks pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda, serta mendukung kelancaran saber pungli, Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya melalui Inmendagri Nomor 180/3935/Sj Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pungutan Liar, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/Sj Tanggal 11 November 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

G/370/IV.01/HK/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Provinsi Lampung.

Dalam Instruksi Menteri tersebut telah diperintahkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk menghentikan praktek pungli, melakukan Sosialisasi secara masif terhadap layanan bebas pungli dan secara khusus kepada APIP diminta untuk

melakukan pengawasan terhadap area yang berpotensi terjadinya pungli khususnya pada 7 (Tujuh) Area, yaitu: Perizinan, Hibah dan Bantuan Sosial, Kepegawaian, Pendidikan, Dana Desa, Pelayanan Publik dan Pengadaan Barang dan Jasa.

"Selain kegiatan kerjasama Satgas Saber Pungli yang sudah berjalan saat ini, Pemerintah daerah bersama KPK-RI juga melakukan upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi melalui pendampingan Monitoring Centre for Prevention (MCP), yang mengimplementasikan 8 (delapan) area intervensi program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur. Adapun Capaian Progres MCP Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 senilai 91,79," ucap Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya membangun persepsi publik secara positif, dan ekspose kerja nyata unit pemberantasan pungli kepada masyarakat secara luas.

"Bangun koordinasi dan komunikasi yang efektif sesama anggota unit kerja. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengalokasikan anggaran pendukung Untuk Saber Pungli sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan senantiasa kita menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah Ini, pungkas Gubernur.

Sementara itu, Irwasum Mabes Polri Selaku Kasatgas Saber Pungli Pusat- Komjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.,CSFA, dalam arahannya menyatakan bahwa dampak praktek pungli dapat berakibat pada Biaya ekonomi yang tinggi, Kerusakan tatanan masyarakat, menghambat pembangunan nasional, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, Agung Budi Maryoto menyatakan perlunya dilaksanakan sosialisasi perpres no. 87 tahun 2016 1 tentang satgas saber pingli kepada masyarakat sebagai paya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum

masyarakat. Kemudian perlunya implementasi kota bebas pungli sebagai upaya nyata mendukung kerjakan pemerintah mewujudkan indonesia bersin bebas dari pungli.

Agung Budi Maryoto juga mengatakan perlunya setiap aparatur penyelenggara negara memahami tugas pokok masing-masing bidang dan pokja, agar dapat menjalankan tugas pemberantasan pungli secara profesional, proporsional dan akuntable

"Setiap aparatur penyelenggara negara juga harus memiliki integritas taat asas, serta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Ketua PPID Pelaksana

IRSAN, S.Sos., M.IP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731025 200212 1 006

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. RW. Monginsidi No. 69 Telukbetung – Bandar Lampung
Telp./Fax (0721) 475270 E-mail : kominfo@lampung.go.id

PRESS RELEASE

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Gerak Cepat Bangun Kolaborasi Dalam Pengendalian Inflasi dan Dampaknya di Provinsi Lampung

BANDARLAMPUNG---Koordinasi dan kolaborasi atau kerjasama antar unit pemerintahan beserta stake holder terkait menjadi prasyarat bagi implementasi strategis pengendalian inflasi, menyusul penetapan pemerintah untuk harga BBM pada beberapa waktu lalu.

Setelah kemarin (05/09/2022) mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti beberapa pejabat utama Kementerian/Lembaga serta pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pagi ini memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah di Provinsi Lampung, Selasa (06/09/2022) yang berlangsung di Aula Mahan Agung.

Hadir pada Rakor tersebut Bupati/Walikota yang didampingi Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Perekonomian masing-masing, Jajaran Forkopimda, Pertamina, Bulog, BI, dan BPS membahas pelaksanaan strategi dasar pengendalian inflasi dan dampaknya di Provinsi Lampung.

Dalam arahannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan kembali arahan dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan.

Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing dana 2% dari DTU (Dana Transfer Umum), dan menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH (Dana Bagi Hasil) Triwulan IV Tahun 2022. Tidak termasuk Belanja Wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022.

Kemudian, Refocusing dan Dana Reguler APBD tersebut diarahkan pada skema-skema untuk mempertebal bantalan JPS (Jaring Pengaman Sosial), mendukung subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat, dll.

Selain itu, juga pemanfaatan Dana desa maksimal 30% digunakan untuk bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi, sesuai dengan diterbitkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa tertanggal 11 Agustus 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Gubernur juga meminta kepada Bupati/ Walikota agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaksanakan program-program yang diarahkan Kemendes, dengan dukungan pendampingan dari pengawas dan penegak hukum agar tepat sasaran dan taat aturan.

"Saya meminta agar Bupati dan Walikota bersama Forkopimda agar memantau dan mengendalikan gerakan-gerakan yang dapat mengganggu dan memberikan dampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan politik," ucap Gubernur.

Kemudian Gubernur juga menegaskan kembali agar Pemerintah Daerah melaksanakan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) sebagai upaya dalam pengendalian inflasi.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bahwa saat Rakor dengan Mendagri Senin Lalu, Menteri Perekonomian meminta semua pemerintah daerah agar dapat menekan inflasi hingga dibawah angka 5%, oleh karenanya pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah-langkah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Lampung.

"Kemarin tim kita sudah memberikan kerangka, dan acuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan simulasi, jadi 2 persen DAU ini akan digunakan untuk apa saja sesuai kebutuhan di daerah," ujar Sekda.

Pada Rakor tersebut, Fahrizal Darminto juga meminta agar Bupati/Walikota untuk dapat memberikan pemaparan terkait pemanfaatan anggaran DAU, Dana Desa, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan strategi 4K didaerahnya masing-masing sebagai upaya dalam menekan inflasi daerah.

Upaya pengendalian inflasi dengan STRATEGI 4K

Mengendalikan tingkat inflasi di Provinsi Lampung dengan Strategi 4K, yaitu : Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

1. Ketersediaan Pasokan
   - Mengendalikan komoditas daerah dengan prioritas memenuhi kebutuhan daerah kita, baru kemudian sisanya boleh dikirim ke luar daerah. Dengan kata lain, menahan ekspor produk komoditas daerah sampai kebutuhan kita tercukupi.
   - Melakukan Gerakan Tanam Cepat dan Cepat Panen melalui pemanfaatan varietas tanaman cepat panen/genjah. Percepatan gerakan menanam cabe dan bawang di wilayah yang potensial dengan berkolaborasi lintas pelaku seperti kelompok tani, PKK, dll. Manfaatkan juga lahan pekarangan dan lahan tidak produktif di desa.

- Selain cabe dan bawang merah, pastikan komoditas lain juga tercukupi untuk konsumsi masyarakat. Mengembangkan varietas padi yang paling cocok, serta segera mengagendakan restocking ikan di kabupaten.
- BUMD dan BUMN harus mendukung prioritas pemenuhan konsumsi daerah dan juga mendukung daerah lain jika ada surplus.
- Melakukan Kerja sama Antar Daerah (KAD), baik antar-kabupaten/kota maupun antar-provinsi.
- Manfaatkan Dana Desa untuk pangan desa, yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Payung hukum penggunaan dana desa. Keputusan Menteri Desa No. 97/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa: penyediaan data dan informasi, produksi komoditas, dll.

2. Keterjangkauan Harga
- Pemantauan Harga Harian, pelaksanaan operasi pasar, pasar murah bersubsidi.
- Seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat diminta untuk melakukan Gerakan Hemat Energi.
- Pencadangan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD untuk mendukung pengendalian inflasi.
- Optimalisasi BUMDes dalam menyalurkan dana bergulir masyarakat (DBM)
- Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk mendata masyarakat miskin secara akurat agar program bantuan dapat tepat sasaran, dan menyalurkannya tepat waktu.

3. Kelancaran Distribusi
- Kelancaran distribusi harus dikendalikan, jangan ada kemacetan sistem logistik.
- Memanfaatkan bansos, anggaran desa, misalnya untuk subsidi transportasi komoditas dari wilayah produsen ke konsumen.
- Dukungan TNI dan POLRI untuk distribusi bahan pangan pokok dan bahan bakar ke daerah yang sulit dijangkau, serta pengamanannya.
- Meminta kepada Kepolisian Daerah melakukan upaya pengawasan dan penertiban di lapangan untuk menjamin tidak terjadi praktik-praktik yang memperburuk keadaan seperti penimbunan bahan pokok dan bahan bakar, atau bahan bakar yang digunakan tidak sesuai target sasaran (misalnya solar bersubsidi digunakan untuk kegiatan komersial).

4. Komunikasi yang Efektif
- Mengoptimalkan peran TPID baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melakukan rapat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk aparat penegak hukum, menyusun peta baik produksi, kebutuhan, distribusi, perkembangan harga, maupun peta masalah lainnya sebagai upaya melakukan pengendalian inflasi.
- Membuat posko pengendalian inflasi daerah. Untuk itu segera disusun Tim Terpadu (model pengendalian seperti COVID-19).
- Mengaktifkan Satgas Pangan di Provinsi dan semua Kab/Kota.
- Dukungan dan pendampingan oleh BPKP dan Kejaksaan terkait pemanfaatan BTT.

- Melakukan koordinasi dengan Pertamina agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak digunakan untuk industri, serta dukungan Kepolisian Daerah terkait kesiapan operasi lapangan manakala terjadi penyimpangan/penimbunan.
- Memanfaatkan media sosial dan kelola informasi dengan baik untuk sosialisasi agar tidak ada keresahan masyarakat: panic buying, penimbunan barang, dll.
- Penyampaian Laporan Perkembangan Inflasi secara berkala oleh BPS dan Bank Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten/Kota diminta melaporkan secara berkala perkembangan inflasi ke Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat.

Ketua PPID Pelaksana

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

IPSAN, S.Sos., M.IP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731025 200212 1 006

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. RW. Monginsidi No. 69 Telukbetung – Bandar Lampung
Telp./Fax (0721) 475270 E-mail : kominfo@lampung.go.id

PRESS RELEASE

Festival Krakatau Ke-31 Digelar, Gubernur Arinal Dorong Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Lampung Selatan -- Gubernur Arinal Djunaidi mendampingi Menteri Pariwisata & Ekraf RI pada acara Pembukaan Pesona Kemilau Festival Krakatau ke-31 Tahun 2022 dengan tema "Tangguh Berjaya", di Anjungan Agung Terminal Eksekutif Bakauheni, Sabtu (27/08/22).

Plt. Kadis Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Qudrotul Ikhwan melaporkan bahwa Festival Krakatau merupakan wadah apresiasi dan puncak kreatifitas bagi seniman, budayawan dan masyarakat Lampung serta momentum pengingat erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883.

Pada gelaran yang ke-31 tahun 2022 ini, Festival Krakatau yang mengambil tema "Tangguh Berjaya" masuk dalam 110 kalender kepariwisataan nasional Kharisma Event Nusantara 2022.

Adapun acara Budaya Pesona Kemilau Krakatau dan Tour Krakatau yang dilaksanakan pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan utama Festival Krakatau tahun 2022.

Qudrotul juga menginformasikan, Tour Krakatau akan diikuti oleh 300-400 peserta, yang terdiri dari Tenaga Kesehatan yang merupakan trip reward selama penanganan Covid-19, peserta Lampung Familiarization Trip 2022 yaitu para influencer, vlogger, blogger serta jajaran Pemprov Lampung, Forkopimda dan undangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Indonesia telah dinobatkan sebagai Negara tercantik alami nomor satu di dunia oleh studi yang dilakukan peneliti dari Money.co.uk, sebuah situs layanan perbandingan dari Inggris. Hal tersebut, kata Gubernur, dipublikasikan oleh Majalah Time Out yang terbit di 328 Kota besar di 58 Negara seluruh dunia.

Pariwisata dan ekonomi kreatif dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap kebangkitan sektor kepariwisataan pasca pandemi dan mempunyai efek pengganda yang besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Bahkan sebelum pandemi melanda, Gubernur juga mengungkapkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diproyeksikan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki ribuan destinasi wisata yang sangat bernilai, berbagai macam produk ekonomi kreatif dan sejalan dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal juga menginformasikan bahwa pada Triwulan II tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Lampung mengalami peningkatan sebesar 9,12% dibandingkan dengan Triwulan I dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia.

"Mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mendukung pembangunan Lampung di berbagai sektor, termasuk sektor Pariwisata," kata Gubernur.

Selanjutnya, Gubernur Arinal Djunaidi menjelaskan bahwa pembangunan sektor kepariwisataan Provinsi Lampung telah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Salah satu keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung menurut Gubernur adalah aksesibilitas yang mudah dan dekat dengan ibukota negara.

"Alhamdulillah, Provinsi Lampung tahun 2021 lalu telah mendapatkan dukungan dari pusat dengan dimulainya Ground Breaking Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City," kata Gubernur.

Hadir dalam acara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Deputi bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Forkopimda Provinsi Lampung, Perwakilan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Dirut PT. ASDP Indonesia, Direktur Event Daerah Kemenparekraf, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Lampung, Kepala PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Budayawan, serta para Influencer Vlogger dan Blogger.

Ketua PPID Pelaksana

IRSAN, S.Sos., M.IP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731025 200212 1 006

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. RW. Monginsidi No. 69 Telukbetung – Bandar Lampung
Telp./Fax (0721) 475270 E-mail : kominfo@lampung.go.id

PRESS RELEASE

Peringatan Hari Konsumen Nasional Tahun 2022, Gubernur Arinal Djunaidi Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

Bandar Lampung --- Gubernur Arinal Djunaidi mengikuti Senam Bersama dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional Tahun 2022, di Lapangan Korpri Komplek Perkantoran Gubernur, Jumat (26/8/22).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa Hari Konsumen Nasional memiliki arti peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pemahaman konsumen akan hak dan kewajiban dan menempatkan konsumen sebagai subyek dalam kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan.

Gubernur juga mendorong seluruh masyarakat untuk selalu memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

"Kita lakukan ini agar konsumennya menjadi lebih cerdas, bangga dan menyukai produk dalam negeri. Dengan demikian kita harapkan, para pelaku usaha akan bangkit," kata Gubernur.

Gubernur juga meminta pada seluruh dinas terkait untuk menyosialisasikan arti pentingnya menggunakan produk dalam negeri serta mendukung UMKM, sehingga pada suatu saat produk-produk dalam negeri memiliki daya saing dan berkelas nasional bahkan mampu bersaing di pasar global.

"Selamat Hari Konsumen Nasional. Semoga masyarakat Lampung menjadi masyarakat yang cerdas serta dapat menentukan kebutuhannya sehari-hari dengan menggunakan produk dalam negeri," ucap Gubernur.

Terkait senam bersama yang diikuti sekitar 1000 peserta dari seluruh lapisan masyarakat ini, Gubernur meminta agar kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin dengan kolaborasi berbagai OPD, karena kegiatan ini memiliki banyak manfaat.

"Saya senang kegiatan senam ini diikuti oleh masyarakat, para pelajar SMA dan SMP. Sehat fisik berarti sehat jasmani serta sehat rohani untuk membangun bangsa," kata Gubernur.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur melakukan penyerahan hadiah Lomba Kebersihan Kantor Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Juara 1 dimenangkan oleh Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi, Juara 2 dimenangkan oleh Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan serta Juara 3 dimenangkan oleh Dinas Kesehatan.

Selanjutnya, Gubernur mengumumkan pemenang sekaligus menyerahkan hadiah doorprize berupa sepeda, kulkas, mesin cuci, TV, dan lainnya. Gubernur juga meninjau berbagai stand UMKM yang berada di lokasi acara

Ketua PPID Pelaksana

IRSAN, S.Sos., M.IP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731025 200212 1 006

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. RW. Monginsidi No. 69 Telukbetung – Bandar Lampung
Telp./Fax (0721) 475270 E-mail : kominfo@lampung.go.id

PRESS RELEASE

Gubernur Arinal Terima Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Pendukung Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian dari Menteri Pertanian RI

Jakarta- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, kembali menerima piagam penghargaan, kali ini dari Menteri Pertanian RI H. Syahrul Yasin Limpo, sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Pendukung Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian.

Penghargaan diserahkan Menteri Pertanian RI, H. Syahrul Yasin Limpo dan diterima Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kusnardi, di Lapangan Upacara Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (17/8/2022).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kusnardi mengatakan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 77 kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 Gubernur Lampung mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian atas kinerja dan prestasi yang sangat baik dalam mendukung dan memajukan sektor pertanian khususnya asuransi pertanian.

Pada tahun 2022, tambahnya, Pemerintah Provinsi mendukung Program Asuransi Pertanian melalui Program Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 20% untuk 30.000 Ha sawah dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) 20% untuk 2.500 ekor sapi/kerbau.

Kusnardi menambahkan, asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahataninya. "Asuransi Pertanian merupakan pengalihan resiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin, "ujarnya.

Ketua PPID Pelaksana

IRSAN, S.Sos., M.IP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731025 200212 1 006